
DIVERSITAS PANGAN POKOK DALAM SEJARAH KEBIJAKAN PANGAN DI INDONESIA

STAPLE FOOD DIVERSITY IN THE HISTORY OF FOOD POLICY IN INDONESIA

Joshua Jolly Sucanta Cakranegara

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Jln. Sosiohumaniora Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia
joshua.jolly.s.c@mail.ugm.ac.id

Diterima tanggal 1 Februari 2022

Disetujui tanggal 27 September 2022

ABSTRACT

This article aims to explain the history of food policy in Indonesia related to the diversity of staple foods in 1945-2021. This research used historical methods and literature studies on food policy studies. The results indicate that no continuity of staple food diversity which is the historical reality of contemporary Indonesian food policy. In the beginning, the diversity of staple food, the local wisdom of the archipelagic community, had received a considerable attention in the idealism of President Sukarno. However, it still was not fulfilled in the next period, such as in the rice politics of President Soeharto, the food security movement of President Megawati Soekarnoputri, the food import policy of President Susilo Bambang Yudhoyono, to the food barn policy of President Joko Widodo. The diversity of staple foods in contemporary government policies is accommodated in short-term, local, or partial scale programs, and not adaptive to changing times. Thus, the fulfillment of community's staple food is still dominated by non-inclusive food policies.

Keywords: *staple foods diversity, local wisdom, food policy, food security, and food sovereignty.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menjelaskan sejarah kebijakan pangan di Indonesia terkait diversitas pangan pokok pada 1945-2021. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan studi pustaka atas kajian kebijakan pangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kesinambungan atas diversitas pangan pokok yang merupakan realitas sejarah bangsa pada kebijakan pangan di masa Indonesia kontemporer. Pada awalnya, diversitas pangan pokok yang merupakan kearifan lokal masyarakat Nusantara mendapat perhatian yang cukup besar dalam idealisme Presiden Sukarno. Akan tetapi, hal ini tidak terpenuhi pada periode selanjutnya, seperti dalam politik beras oleh Presiden Soeharto, gerakan ketahanan pangan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, kebijakan impor pangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kebijakan lumbung pangan oleh Presiden Joko Widodo.

Diversitas pangan pokok dalam kebijakan pemerintah hanya diakomodasi dalam program jangka pendek, berskala kecil/lokal/parsial, serta tidak adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih didominasi oleh kebijakan pangan yang tidak inklusif.

Kata kunci: diversitas pangan pokok, kearifan lokal, kebijakan pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan.

A. PENDAHULUAN

Diversitas atau keberagaman pangan pokok adalah satu hal yang tidak terpisahkan dari Indonesia, selain keberagaman penduduk dan bentang alamnya. Masyarakat di setiap daerah dianugerahi kekayaan pangan pokok sebagai upaya pemenuhan salah satu hak dasar dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, pemerintah yang bertanggung jawab atas hal ini semestinya terbantu dengan diversitas pangan pokok ini. Akan tetapi, hal yang terjadi adalah sering kali diversitas pangan pokok terabaikan dalam kebijakan pangan di Indonesia sepanjang sejarahnya. Padahal, dalam konteks bernegara, diversitas pangan pokok sangat penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional, bahkan mewujudkan kedaulatan pangan.

Jauh sebelum Indonesia (dahulu Nusantara) dikenal saat ini, masyarakat di setiap daerah telah mampu memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan pada kearifan lokal dan kekayaan alamnya yang beragam (Atmosudiro 2015:6-8). Masyarakat Nusantara pada awalnya tidak mengenal padi atau beras (*Oryza sativa*) seperti saat ini. Sejumlah pakar menyebut bahwa padi dibawa oleh pedagang Tiongkok dan India ke Nusantara. Sebelumnya, sagu menjadi pangan pokok sebagian besar masyarakat Nusantara, baik di Sumatra,

Jawa, hingga Maluku. Oleh sebab itu, kata *sega* dalam bahasa Jawa yang sekarang berarti “nasi” dahulu diidentikkan dengan sagu. Setelah itu, padi dibudidayakan atau mengalami domestikasi di Jawa dan Sumatra karena kondisi geografis yang mendukung (Arif 2019:24-25; Rahman 2016a:19, 295).

Selain itu, talas dan ubi juga telah mendahului padi. Akan tetapi, padi kemudian menjadi tanaman yang lebih disukai karena dapat tumbuh di mana saja dengan baik, kecuali di kawasan timur Nusantara yang gersang. Oleh sebab itu, jagung menjadi tanaman tanah kering yang berharga. Tanaman ini sudah ditanam di Maluku sejak abad ke-16 seiring dengan kedatangan bangsa Spanyol (Reid 2020a:23).

Meski padi dapat tumbuh subur di kawasan Nusantara bagian barat, peran penting pangan pokok pokok yang lain tidak berarti ditiadakan. Marsden mencatat bahwa jika tanaman padi mereka gagal, orang Sumatra akan beralih pada umbi-umbian liar. Oleh sebab itu, kegagalan padi-padian tidak pernah menimbulkan krisis pangan karena mengedepankan diversitas pangan pokok. Bahkan, satu kesimpulan yang dapat diambil adalah kelaparan atau ketimpangan makanan tidak pernah menjadi bahaya bagi sebagian besar masyarakat Nusantara,

bahkan Asia Tenggara (Reid 2020a:23-24, 58).

Rahman (2016a:25) menyebut bahwa diversitas pangan pokok pada periode prakolonial sudah dikenal masyarakat Nusantara secara luas. Namun, narasi demikian seakan tertutup dengan kisah kegemilangan rempah-rempah yang mendominasi perdagangan di Nusantara, bahkan Asia Tenggara pada periode klasik tersebut.

Selanjutnya, diversitas pangan pokok ini mulai meredup ketika Belanda datang ke Nusantara melalui kongsi dagang VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) di Ambon. Politik monopoli penanaman dan perdagangan rempah-rempah, khususnya lada, pala, dan cengkih menyebabkan kebutuhan dasar pangan masyarakat setempat terabaikan. Hal ini dicatat oleh seorang Jerman yang turut menginjakkan kaki di Ambon bersama VOC bernama Rumphius. Ia telah menuliskan catatan yang kemudian diterbitkan dalam *Herbarium Amboinense* pada 1741.

Rumphius menulis bahwa diversitas pangan pokok menjadi sebuah potensi yang sangat berharga jika dikelola dengan baik. Akan tetapi, hal sebaliknya terjadi. Ia menyebut bahwa Belanda tidak melakukan pemuliaan tanaman di koloni mereka. “Tidak adanya hasrat, ketidakpekaan, dan keterlambatan Belanda dalam mengelola dengan baik potensi boga di tanah koloninya sendiri,” tulisnya. Padahal, jika Belanda berbuat sebagaimana disarankan Rumphius, wilayah Maluku akan tetap harmonis dengan segala kekayaan alam dan

pangan pokoknya (Rahman 2016a:33-38).

Hegemoni Belanda untuk mengedepankan rempah-rempah hanya sebagai komoditas bisnis-ekspor berusaha dilawan oleh para penguasa lokal. Menurut mereka, penanaman rempah-rempah di daerah yang tidak mendukung secara geografis justru akan mengancam kecukupan pangan (pokok). Oleh sebab itu, tidak sedikit dari mereka yang berusaha “menarik diri dari ekonomi dunia” (Reid 2020b:344).

Hal tersebut terungkap dalam sejumlah sumber lokal. “Biarkan tak seorang pun di negeri ini menanam lada, sebagaimana hal itu tak dilakukan di Jambi dan Palembang. ... Tak diragukan lagi bahwa mereka akan tiba pada saat keruntuhannya. Yang didapat hanya perseteruan dan pangan pokok akan menjadi mahal,” demikian keluhan dalam hikayat Kerajaan Banjarmasin pada akhir abad ke-17. Peringatan serupa juga tertulis dalam Hikayat Pocut Mohammad dari abad ke-18 di Aceh. “Perdagangan tidak banyak memberi keuntungan sekalipun engkau tanam lada, wahai sahabatku. ... Apa bagusnya ikat kepala bangsawan atau keris bergagang emas, jika tiada pangan di negeri ini,” tulisnya (Reid 2020b:344-347).

Pada periode berikutnya, konsumsi masyarakat atas pangan pokok yang beragam tetap berlanjut. Di Jawa, bahan makanan pokok yang paling penting adalah beras pada abad ke-19. Konsumsi beras pun meningkat akibat bertambahnya luas tanah yang dijadikan persawahan oleh pemerintah kolonial. Berbeda dengan masyarakat

Jawa, sagu dijadikan makanan pokok orang Maluku dan Kalimantan. Jagung juga menjadi makanan pokok di Jawa Timur, Madura, dan Kepulauan Kei, Maluku. Raffles bahkan menyebut bahwa budi daya tanaman jagung di Jawa menjadi sesuatu yang umum dan sama pentingnya dengan beras (Rahman 2016b:25, 102).

Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia-Belanda mulai mengintensifkan perkebunan yang berorientasi ekspor, seperti gula, karet, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Menariknya, oleh pemerintah kolonial, pangan pokok menjadi penyokong yang penting, terutama beras. Harga beras dipertahankan pada tingkat yang rendah agar tingkat upah pekerja perkebunan juga rendah (Mears dan Moeljono 1990:29-30). Dengan kata lain, beras mulai diutamakan, meski hanya sebagai komponen pendukung industri, dan secara tidak langsung, pangan pokok lain mulai dikesampingkan.

Selanjutnya, ketika pemerintah kolonial menetapkan Politik Etis pada 1901, produktivitas pangan dan pertumbuhan penduduk meningkat dengan adanya irigasi (pengairan) dan migrasi (perpindahan penduduk). Akan tetapi, memasuki dekade ketiga abad ke-20, krisis ekonomi muncul dan produktivitas pangan menurun. Pada periode ini, beras dan jagung menjadi tanaman pangan yang paling penting, ditambah ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang kedelai. Meskipun demikian, beras menjadi pangan pokok hampir di seluruh Jawa, bahkan di luar Jawa (Buitengewesten) (Boeke 1942:109-110).

Konsumsi beras makin meluas ke luar Jawa akibat kebijakan transmigrasi penduduk Jawa ke luar Jawa. Ketika penduduk di Jawa meningkat signifikan pada 1930-an, pemerintah menjajaki beberapa daerah transmigrasi, seperti Sumatra dan Sulawesi. Untuk mendukung program itu, pemerintah melakukan intensifikasi pertanian padi dengan memberikan pelatihan, menyuplai benih, menyediakan sarana irigasi dan penggilingan, mengatur luas area persawahan melalui skema sewa jangka panjang, hingga menyeleksi para petani baru yang akan dikirim ke luar Jawa. Fenomena ini disebut sebagai “kolonisasi pertanian asli” (*native agricultural colonization*). Dengan demikian, intervensi pemerintah justru memperparah kenaikan konsumsi beras sebagai pangan pokok masyarakat di hampir seluruh wilayah Hindia-Belanda pada waktu itu (Boeke 1942:111-114, 141-150).

Pada saat pemerintah kolonial begitu mengedepankan beras, salah satunya melalui kebijakan pengiriman petani (beras) ke luar Jawa, masyarakat mulai menyadari dampak negatif yang dapat timbul dalam jangka panjang. Boeke (1946:174-175) menyebut bahwa masyarakat bumiputra di perdesaan pada dasarnya bertani untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dan tidak berorientasi pada keuntungan. Oleh sebab itu, perubahan orientasi yang ekstrem dan koersif dari pertanian subsisten ke pertanian komersial menyebabkan timbulnya kesadaran untuk kembali pada hakikat pertanian, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan. Ditambah lagi, krisis pada 1930-an mendorong pemenuhan

pangan sebagai hal yang mendasar. “Hampir selalu hal yang sama di mana-mana: budi daya tanaman pangan, penanaman padi, adalah yang utama,” demikian kesadaran masyarakat yang diungkap Boeke.

Lebih lanjut, Boeke (1946:179-180) menyebut bahwa faktor-faktor eksternal, seperti perang, wabah, infrastruktur, dan situasi global, turut memukul para pekerja perkebunan dan masyarakat pada umumnya. Pemaksaan budi daya tanaman komersial terbukti “memukul dan menghancurkan” cara hidup mereka. “Apa yang telah mereka alami dalam beberapa tahun terakhir dalam upaya mereka untuk menanam tanaman komersial telah meyakinkan banyak pekerja perkebunan (dan masyarakat) bumiputra, baik di Jawa maupun luar Jawa, bahwa lebih baik dan lebih aman untuk menanam tanaman pangan,” pungkasnya.

Berdasarkan dinamika pada periode klasik hingga kolonial, satu simpulan yang pasti adalah pangan pokok memegang peranan penting dalam masyarakat dan pemerintah pada setiap periodenya berusaha mengintervensi dengan apa yang sekarang disebut sebagai “kebijakan pangan”. Kebijakan pangan dimaksud adalah kebijakan penyelenggaraan pangan yang meliputi “kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu,” sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lebih lanjut, pangan

pokok didefinisikan sebagai “pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal” (Indonesia 2012).

Di samping dua konsep utama tersebut, konsep ketahanan pangan dan kedaulatan pangan juga digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan UU yang sama, ketahanan pangan didefinisikan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.” Selain itu, kedaulatan pangan didefinisikan sebagai “hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal” (Indonesia 2012).

Dari tiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa UU Pangan telah menggarisbawahi betapa pentingnya pangan yang mengedepankan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Dengan kata lain, diversitas pangan pokok sejatinya menjadi arus utama pemenuhan kebutuhan dasar warga negara Indonesia, yakni pangan.

Sejumlah kajian telah membahas kebijakan pangan pada periode presiden tertentu. Beberapa contoh, di antaranya buku *Mustika Rasa* (2020) [terbitan pertama 1967] identik dengan

kebijakan pangan Presiden Sukarno, sedangkan buku *Pangan dalam Orde Baru* (1994) identik dengan kebijakan pangan Presiden Soeharto. Di sisi lain, buku *Ekonomi Berdikari Sukarno* (2014) turut memperlihatkan kelemahan kebijakan pangan Presiden Sukarno dan buku *Gagalnya Politik Pangan di Bawah Rezim Orde Baru: Kajian Ekonomi Politik Pangan di Indonesia* (2004) menunjukkan kelemahan kebijakan pangan Presiden Soeharto.

Selanjutnya, sebagian besar kajian kontemporer mengkritik secara khusus kebijakan pangan Presiden Soeharto, meski bukan sebagai bahasan utama, di antaranya buku *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati: Pertaruhan Bangsa yang Terlupakan* (2004) yang dieditori oleh Francis Wahono, A. B. Widyanta, dan Titus O. Kusumajati, juga trilogi karya Ahmad Arif, yakni *Sagu Papua untuk Dunia* (2019), *Sorgum: Benih Leluhur untuk Masa Depan* (2020), dan *Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan* (2021).

Berbeda dengan studi-studi tersebut, artikel ini berfokus pada persoalan kesinambungan akomodasi sekaligus implementasi diversitas pangan pokok dalam kebijakan pangan di Indonesia pada setiap masa pemerintahan. Jika pada periode klasik, diversitas pangan pokok adalah satu hal yang lumrah, hal sebaliknya terjadi pada masa kolonial. Diversitas pangan pokok seakan menghilang akibat hegemoni pemerintah untuk mengendalikan pangan pokok sebagai alat stabilitas kekuasaan. Masyarakat Nusantara, yang sebagian besar wilayahnya kemudian mencakup Hindia-Belanda dan kini Indonesia,

sangat terdampak dengan hegemoni ini. Oleh sebab itu, hal inilah yang pada periode Indonesia merdeka menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam artikel ini adalah diversitas pangan pokok dalam dinamika kebijakan pangan di Indonesia pada 1945-2021. Rumusan masalah ini dijabarkan dalam satu pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana diversitas pangan pokok diakomodasi dalam kebijakan pangan pada setiap masa pemerintahan?

Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk menjelaskan dinamika kebijakan pangan di Indonesia terkait diversitas pangan pokok dalam periode pemerintahan lima presiden di Indonesia, yakni Presiden Sukarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ruang lingkup spasial dalam artikel ini adalah Indonesia, sedangkan ruang lingkup temporal adalah periode Indonesia merdeka sejak 1945 hingga 2021.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang menekankan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan empat tahap, yaitu pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Sumber yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa kajian atas kebijakan yang sesuai dengan periode yang dibahas. Terkadang, kajian ini tidak

selalu sezaman dengan masing-masing periode presiden. Di luar itu, kajian sezaman digunakan secara lebih luas. Selain itu, surat kabar daring secara terbatas juga digunakan. Untuk mendukung analisis atas kebijakan pangan, penulis menggunakan sumber sekunder berupa artikel, buku, atau jurnal yang membahas kebijakan pangan tersebut. Sumber-sumber tersebut ditelusuri dan ditemukan di sejumlah tempat, seperti Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Kolese Santo Ignatius Yogyakarta, Perpustakaan Provinsi Bali, dan Perpustakaan Kota Denpasar.

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, penulis melakukan kritik untuk menguji keabsahan sumber. Penulis membandingkan sejumlah data untuk memperoleh kesesuaian atas “jiwa zaman” saat suatu kebijakan pangan berlaku. Misal, dalam berbagai sumber masa Orde Baru, terminologi “swasembada beras” selalu mendominasi kajian terkait. Dari sini, penulis kemudian melakukan interpretasi sehingga menghasilkan sejumlah fakta sejarah. Pada akhirnya, fakta-fakta ini disusun sehingga menghasilkan sebuah konstruksi historis yang kronologis dan komprehensif.

Pada awalnya, tulisan ini merupakan makalah penulis berjudul “Diversitas Bahan Pangan dalam Dinamika Politik Ideal dan Politik Praktis di Indonesia” yang dipresentasikan dalam Internasional Conference on Indonesian Culture (ICONIC) pada 30 November-2 Desember 2021 dengan tema “The Resilience of the Cultural Ecosystem through the Pandemic”. Konferensi ini diselenggarakan secara

daring oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan Koalisi Seni.

Perubahan judul dilakukan untuk mempertegas rumusan masalah, yaitu *Diversitas Pangan Pokok dalam Sejarah Kebijakan Pangan di Indonesia*. Pangan pokok merupakan terminologi yang diambil dari UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Di sisi lain, terminologi kebijakan pangan diambil untuk menegaskan metode dalam penelitian ini, yaitu analisis atas kebijakan pangan yang berlaku sepanjang masa kepemimpinan sejumlah presiden di Indonesia.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Diversitas Pangan Pokok dalam Kebijakan Pangan Masa Presiden Sukarno

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Presiden Sukarno menyadari bahwa salah satu persoalan pelik yang dihadapi negara “seumur jagung” ini adalah persoalan pangan. Oleh sebab itu, pangan selalu menjadi prioritas dalam kebijakan politiknya. Meskipun demikian, dinamika politik yang tidak stabil pada periode Perang Kemerdekaan (1945-1950) dan 1950-an menyebabkan pemenuhan pangan rakyat belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 dan kekuasaan pemerintahan berada di bawah satu komando, Demokrasi Terpimpin,

idealisme atas kebijakan pangan di Indonesia mulai termanifestasi dalam kebijakan politiknya, baik dalam tataran politik gagasan maupun politik praktis.

Dalam tataran politik gagasan, Presiden Sukarno dalam berbagai pidatonya menekankan pentingnya swasembada (*self sufficiency*) dalam hal pangan. Secara gamblang, ia menyebutnya sebagai “berdikari dan berdaulat dalam pangan.” Hal ini tertuang dalam pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas), sebuah badan perancang “*overall blueprint* pembangunan berencana, *plantmatig*” per lima tahun. Rencana tersebut diuraikan oleh Mohammad Yamin ke dalam 17 jilid buku, 8 bab, dan 1.945 halaman. “Untuk mencapai kedudukan *self sufficiency* di lapangan sandang pangan, bahan makanan, dan pakaian, dan obat-obatan,” demikian visi pertama dalam pedoman pelaksanaan pembangunan bidang produksi sebagaimana diamanatkan Presiden Sukarno kepada Depernas (Rahardjo dan Herdianto 2001:90-100).

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan melalui diversitas pangan pokok dalam berbagai pidato. Misal, pada pidato hari ulang tahun ke-19 kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1964 bertajuk “Tahun *Vivere Pericoloso* (Tahun Berani Menyerempet Mara Bahaya)”, Presiden Sukarno dengan yakin menyerukan penghentian impor beras dan mulai meminta masyarakat untuk “berkorban” dan mengenal kembali identitas pangan mereka yang sejatinya telah mendarah daging dalam kearifan lokal yang

beragam. “Tambahlah menu berasmu dengan jagung, dengan ubi, dengan lain-lain. Jagung adalah makanan sehat, kacang adalah makanan sehat! Saya sendiri sedikitnya seminggu sekali makan jagung, dan badanku, lihat, adalah sehat,” ujar Presiden Sukarno (Rahardjo dan Herdianto 2001:205-6).

Hal ini bukanlah tanpa alasan. Mengutip penelitian pada periode 1950-an hingga 1960-an yang dilakukan oleh akademisi dan lembaga pangan, baik di dalam maupun di luar negeri, pemenuhan pangan pada saat itu terbukti justru lebih buruk dibandingkan periode kolonial. Selain karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, ketergantungan terhadap beras adalah penyakit menahun yang menyebabkan krisis pangan terus terjadi, meski produksi beras mengalami peningkatan. “Tetapi dengan segera pemakan nasi terus meningkat,” ungkap penelitian Sunardjo (Lembaga Makanan Rakyat) dan B. Napitupulu (Akademi Pendidikan Nutrisi) (Rizal 2020:xvi).

Oleh sebab itu, dalam tataran politik praktis, Presiden Sukarno menginisiasi penerbitan sebuah *kookboek* (buku masak) yang memuat resep masakan dari seluruh penjuru Indonesia. Buku ini merupakan perwujudan dari gagasan “mustika rasa” yang merupakan politik *self reliance* (percaya pada kekuatan sendiri) dan *self supporting* (swadaya) atas pangan. Buku ini tidak lain merupakan sarana memasyarakatkan kembali apa yang pernah hilang di tengah masyarakat pada waktu itu, yakni diversitas pangan.

Sejak 1960, buku *Mustika Rasa* dikerjakan oleh Departemen Pertanian

yang melibatkan banyak pihak, mulai dari ahli masak, pengolah makanan, ahli gizi, bahkan pematung, penyair, pelukis, dan arsitek. Dengan demikian, Sukarno menyebut bahwa ini adalah “suatu revolusi yang multi-kompleks karena lahir dari satu problematik yang kompleks” (Rizal 2020:xxiii).

Tidak sampai di situ, Presiden Sukarno dalam berbagai kesempatan turut mengedukasi masyarakat atas pentingnya diversitas pangan pokok sebagai cara untuk berdikari dalam hal pangan. Di berbagai tempat, ia mendorong masyarakat untuk menggali kebiasaan-kebiasaan lama memakan aneka macam makanan. Sukarno memopulerkan lagu “Kerontjong Bersukaria” dengan lirik, “Siapa bilang bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang Indonesia lapar, Indonesia banyak makanan”. Selain itu, ia menjadikan istrinya, Hartini, sebagai bagian dari aktivitas kebijakan pangannya. Hartini terlibat dalam “Festival Makanan dan Minuman Indonesia” yang turut mendukung penyusunan buku *Mustika Rasa* sekaligus memperkenalkan diversitas bahan dan olahan pangan, baik bagi masyarakat maupun bagi wisatawan (Rizal 2020:xviii-xxiii).

Memasuki fase penghabisan pemerintahan Sukarno (1964-1966), ia membentuk Panitia Penyelesaian Buku Masakan Indonesia *Mustika Rasa*. Akhirnya, setelah Peristiwa 1965 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Sukarno, buku setebal 1.123 halaman tersebut diterbitkan. Buku ini memuat lebih dari 1.600 resep yang terdiri atas makanan utama, lauk pauk basah dan kering, lauk pauk gorengan dan

bakar, aneka jenis sambal, jajanan, serta minuman. Ini merupakan sebuah warisan yang berharga atas “dunia dapur Indonesia” yang pada periode berikutnya mulai memudar dan bahkan tidak begitu dikenal lagi (Rizal 2020:xxvi-xxvii).

Sebelum buku *Mustika Rasa* terbit, idealisme Presiden Sukarno atas kedaulatan pangan yang disimpulkan dalam slogan, “kemerdekaan dimulai dari lidah,” mulai diikuti masyarakat, sebagaimana pengakuan Alwi Shahab. “Saya menikah pada Desember 1961, saat itu masyarakat banyak yang makan bubur atau makan nasi campur jagung.” Meskipun demikian, kampanye diversifikasi pangan tidak begitu masif. Kelangkaan beras yang timbul kemudian pada akhir kekuasaan Presiden Sukarno dan menyebabkan krisis besar merupakan bukti bahwa beras masih menjadi komoditas vital dalam perekonomian nasional (Rizal 2020:xxiv-xxv).

Idealisme atas diversitas pangan pokok juga tidak dapat terwujud sepenuhnya pada waktu itu akibat perhatian pemerintah dan semua pendukung revolusi tertuju pada pembebasan Irian Barat. Al-Rahab (2014:58-60) menyebut bahwa sebesar 80% dari APBN terpakai untuk program pembebasan Irian Barat sehingga bidang-bidang produksi, salah satunya pangan, tertunda. Bahkan, kenaikan anggaran militer yang sangat besar menyebabkan sedikitnya anggaran terhadap pemenuhan sandang pangan yang bermuara pada penolakan dari banyak pihak. Tidak hanya itu, bencana alam turut memperparah

kemerosotan produksi pangan pokok pada waktu itu.

Oleh sebab itu, visi kedaulatan pangan akhirnya bergeser kepada kebijakan jangka pendek yang ber-pangkal pada persediaan beras yang cukup. Hal ini termaktub dalam Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada 1963 yang menekankan ekstensifikasi pertanian, reformasi agraria, dan pembangunan sarana produksi pangan. Akan tetapi, upaya ini tetap tidak membuahkan hasil yang signifikan. Setelah 1964, secara umum kebijakan ekonomi negara menjadi berantakan akibat banyaknya sektor ekonomi yang tidak mampu untuk memproduksi lagi akibat kelangkaan modal. Salah satu sektor produksi tersebut tidak lain adalah sektor pangan (Al-Rahab 2014:61-68).

2. Diversitas Pangan Pokok dalam Kebijakan Pangan Masa Presiden Soeharto

Peristiwa 1965 merupakan titik balik kebijakan pangan di Indonesia. Buku *Mustika Rasa* sebagai warisan intelektual yang digagas oleh Presiden Sukarno tidak begitu berkembang setelah dipublikasikan pada 1967. Malah, kecenderungan kebijakan pangan yang dijalankan selama lebih dari tiga dekade pemerintahan Presiden Soeharto adalah mengulang kembali sejarah, yakni hegemoni pemerintah atas pemenuhan pangan yang terwujud dalam keseragaman, bukan keberagaman pangan pokok.

Bustanil Arifin, Menteri Urusan Pangan sekaligus Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) menulis bahwa diversitas pangan pokok cenderung

meredup akibat tidak hanya peran pemerintah, melainkan juga masyarakat. Peningkatan konsumsi beras dan bergesernya pangan pokok yang lain, seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, masyarakat menganggap bahwa beras tidak hanya merupakan bahan makanan pokok, tetapi juga mampu meningkatkan status sosial mereka. *Kedua*, oleh sebab itu, masyarakat pun beranggapan bahwa kedudukan beras relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pangan pokok lain. *Ketiga*, hal ini juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang makin membaik sehingga pendapatan sekaligus pengeluaran masyarakat meningkat untuk mengonsumsi beras dibanding pangan pokok lain (Arifin 1994:193).

Oleh sebab itu, pemerintah Orde Baru memberlakukan empat usaha pokok untuk meningkatkan produksi pangan dan memenuhi kecukupan pangan menuju swasembada pangan dan peningkatan gizi masyarakat, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Sejak PELITA (Pembangunan Lima Tahun) Pertama hingga Keempat (1969-1989), dua usaha pertama masih mendominasi. Usaha intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui sarana irigasi, benih unggul, pestisida, dan sebagainya. Selain itu, usaha ekstensifikasi bertujuan untuk memperluas areal persawahan, seperti membuka sawah baru. Usaha diversifikasi bertujuan untuk mendorong penganekaragaman usaha tani maupun komoditas pertanian. Terakhir, usaha rehabilitasi bertujuan untuk memulih-

kan kemampuan daya produktivitas pertanian (Arifin 1994:221-224).

Dari empat usaha pokok di atas, diversifikasi merupakan usaha untuk mendukung diversitas pangan pokok. Meskipun demikian, Arifin mengakui bahwa perhatian atas usaha positif tersebut masih minim akibat terpaku pada usaha untuk mencapai swasembada beras. Selain itu, pengembangan teknologi budi daya komoditas di luar padi juga masih tertinggal. Sejatinya, diversifikasi di sektor pertanian adalah sebuah kebutuhan yang “alamiah”. Akan tetapi, masalahnya terletak pada pembinaan produksi pangan pokok nonberas sehingga dapat memengaruhi tingkat konsumsi pangan pokok masyarakat (Arifin 1994:210-213).

Selain dari sisi produksi, usaha diversifikasi konsumsi pangan juga didorong kepada masyarakat. Ketimpangan konsumsi beras dan pangan pokok lain tidak terlepas dari ketimpangan produksi beras dan nonberas, sebagaimana diakui di atas. Perhatian pemerintah untuk mendorong diversifikasi konsumsi pangan pokok melalui kebijaksanaan harga, subsidi, deregulasi, dan debirokratisasi tidak menimbulkan dampak yang signifikan (Gaol dan Salam 1990a:70-71). Begitu pula dengan usaha-usaha konvensional, seperti kampanye dan penyuluhan. Menariknya, cara yang diusulkannya adalah pengembangan industri transformasi pangan pokok nonberas menjadi siap dikonsumsi. Arifin menyodorkan contoh pada jagung. Jagung yang awalnya merupakan sebuah komoditas yang kurang “bergengsi”, kini diolah menjadi *corn flakes*. Akibatnya, secara tidak

langsung, permintaan atas komoditas pangan pokok tersebut akan meningkat dan petani-petani komoditas tersebut terangsang untuk meningkatkan produksinya. Selain itu, pengembangan dan pemantapan pola konsumsi pangan pokok setempat juga didorong olehnya (Arifin 1994:178-183).

Pokok-pokok pikiran Arifin di atas bermuara pada satu masalah utama sepanjang pemerintahan Orde Baru, yaitu tujuan kebijakan pangan, apakah swasembada beras atau swasembada pangan? Diakui olehnya, pemerintah tidak pernah menyebut “swasembada beras” dalam berbagai Rencana PELITA (REPELITA). Terminologi “swasembada pangan” dianggap merupakan satu alternatif ketika swasembada beras tidak tercapai. Mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah timbul-tenggelamnya gerakan penganeekaragaman pangan sejalan permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan produksi beras. Oleh sebab itu, pada REPELITA Kelima (1989-1994), pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pemantapan swasembada pangan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam peningkatan dan penganeekaragaman produksi dan konsumsi pangan pokok (Arifin 1994:255-256). Dengan kata lain, hal yang mendesak dilakukan adalah reorientasi program pembangunan sektor pertanian yang didasarkan atas orientasi pasar dan keunggulan komparatif (baca: kearifan lokal) (Bunaser 1990:140-141).

Senada dengan hal itu, Sumodinigrat (1990:259-260) menegaskan dari sisi sosial-ekonomi, bahwa pemerintah semestinya mendorong

diversifikasi pangan pokok ke dua arah, baik ke arah konsumsi maupun produksi. Diversifikasi konsumsi pangan pokok ke arah tanaman nonpadi akan meringankan beban ekonomi dan sosial pemerintah dalam mempertahankan swasembada pangan. Sejalan dengan hal itu, diversifikasi produksi pangan pokok berarti mendukung kebebasan petani dalam memilih macam tanaman yang menurut mereka paling mengun-tungkan dan sesuai dengan kondisi lahan, sumber daya, dan sumber dana. Hal ini dapat didukung dengan kelembagaan petani yang kuat sebagai sarana penyuluhan, pengalokasian sumber daya, hingga peningkatan daya tawar yang mapan dan berkelanjutan.

Usaha diversifikasi pertanian ini pun tidak berarti bertumpu pada sektor pertanian saja. Berbagai kalangan menyerukan adanya kolaborasi inter-sektoral, seperti perpajakan, perbankan, pertanahan, investasi, manajemen, rayonisasi komoditas, hingga penelitian dan penyuluhan yang mendalam. Dengan demikian, usaha untuk mempertahankan swasembada pangan yang makin berat dapat didukung dengan strategi yang menyeluruh tersebut (Gaol dan Salam 1990b:360; Pakpahan dan Kasryno 1990:344).

Idealisme pemerintah Orde Baru atas swasembada pangan yang didukung usaha diversifikasi pertanian tidak terwujud sepenuhnya. Usaha ini masih sebatas pengkajian teoretis yang belum terwujud dalam kebijakan praktis berskala nasional. Pernah tercatat bahwa pemerintah mengampanyekan produksi palawija pasca-swasembada beras pada 1984, tetapi

hal itu tidak berdampak signifikan. Bahkan, pertimbangannya menjadi meluas hingga ke persoalan perluasan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan. Mengapa demikian? Alasannya jelas, sebab “tanpa memperhatikan hal ini, adalah sia-sia kita mendorong mereka (masyarakat) untuk kembali ke *basic food* seperti yang banyak dianjurkan oleh para pengamat ekonomi pertanian akhir-akhir ini” (Amang dan Sawit 2001:48-52).

Menyambung pernyataan tersebut, Suryana (2003:229-235) menyebut bahwa itikad baik pemerintah untuk mendukung diversitas pangan pokok melalui Proyek Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) tidak berjalan dengan baik. “Berbeda dengan pencapaian swasembada beras, upaya diversifikasi pangan karbohidrat ke arah non-beras belum terjadi, malahan terjadi kecenderungan yang sebaiknya,” tulisnya. Dalam perkembangan selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) yang memperkirakan konsumsi beras mengalami pertumbuhan yang melandai bahkan cenderung menurun pun tidak tercapai.

Fahmid (2004:5-6) menilai bahwa kebijakan pangan Presiden Soeharto justru makin menguatkan hegemoni beras sehingga terminologi “politik beras” makin kentara. Beras menjadi alat politik Presiden Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya, memacu pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas politik. Hal ini tidak terlepas dari jargon “revolusi hijau” yang begitu digaungkan Presiden Soeharto selama lebih dari tiga dekade. Jargon ini tidak hanya populer di

Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara.

Secara jelas, Revolusi Hijau telah mengubah sejumlah aspek mendasar dalam bidang pertanian di Indonesia yang berpola serupa pada masa kolonial. Pertanian yang identik dengan ekonomi subsisten berubah orientasi menjadi ekonomi komersial dan kapitalistik. Selain itu, Revolusi Hijau juga mengulang kembali kebijakan pemerintah kolonial yang hendak mempertahankan harga pangan, terutama beras, serendah mungkin untuk menunjang upah buruh industri yang murah. Dengan kata lain, pertanian justru dijadikan pendukung sektor industri, bukan sebaliknya (Fahmid 2004:11-21).

Pada akhirnya, Revolusi Hijau yang menekankan peningkatan produktivitas pertanian melalui pupuk, benih unggul, pestisida, mesin, dan irigasi serta distribusi tunggal oleh BULOG hanya membawa keberhasilan semu. Hal ini karena pada akhirnya impor beras tetap deras pasca-swasembada beras tercapai, yakni pada 1984. Setelah itu, sejumlah masalah, mulai dari masalah sosial, pertanian, ekologi, hingga pedesaan, bermunculan dan kemudian terwariskan pada periode pasca-Orde Baru. Untuk menyikapi masalah tersebut, para petani pun meluncurkan sejumlah perlawanan dengan mengalihkan perhatiannya dari beras ke produksi pangan yang lain. Bahkan, yang lebih parah adalah pengalih-fungsian lahan pertanian menjadi lahan industri (Fahmid 2004:159-170).

Senada dengan hal itu, Arif (2021:192-194) menyebut bahwa pemerintah Orde Baru turut ber-

tanggung jawab atas penyeragaman produksi dan konsumsi pangan pokok masyarakat Indonesia yang merusak warisan kekayaan diversitas pangan pokok yang sudah ada sejak lama. Revolusi Hijau menyebabkan alih fungsi lahan pertanian yang semula untuk beragam jenis tanaman lalu menjadi sebatas padi. Bibit lokal yang sudah dimiliki petani pun diganti dengan bibit transnasional yang dikuasai oleh tangan korporasi. Kewajiban (baca: pemaksaan) kepada petani untuk menggunakan benih dari pemerintah, ditambah dengan pupuk, pestisida, dan sebagainya, turut berdampak negatif bagi sisi ekologis dan sosiologis masyarakat petani. Oleh sebab itu, menjadi masuk akal bila penolakan petani dibaca pemerintah sebagai “melawan pembangunan dan kekuasaan”.

Di samping itu, penyeragaman pola konsumsi masyarakat atas pangan pokok juga telah menjadi obsesi dan standar hidup Orde Baru. Mereka yang tidak makan beras digolongkan orang miskin. Bahkan, pemerintah pada waktu itu menjadikan beras sebagai komponen gaji pegawai negeri sipil dan tentara di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, mereka pun menjadi agen sosial dan perpanjangan tangan pemerintah untuk membawa beras ke seluruh negeri. Dengan kata lain, mereka secara tidak langsung turut berperan dalam meng-gusur diversitas pangan pokok lokal yang telah berkembang jauh sebelumnya (Arif 2021:194-195).

Dalam bahasa yang lebih ringkas, menyikapi fenomena menahun yang akut tersebut, Wahono (2004b:3-18) menyerukan adanya “depolitisasi dan

dekomersialisasi pangan”. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong lebih banyak lagi inisiatif para petani sebagai aktor utama dalam mengangkat kearifan lokal dan mendayagunakan keanekaragaman hayati yang tidak lagi terkekang dengan kekuatan besar di luar mereka, entah itu korporasi, negara, hingga dunia internasional. Pangan sebagai hak dasar rakyat sejatinya diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Tujuan akhirnya adalah “agenda hidup lestari” yang mengacu pada paradigma *kebertanian* “peduli sesama manusia dan alam semesta” serta “berangkat dari kemampuan sendiri” (Wahono 2004a:275-281).

3. Diversitas Pangan Pokok dalam Kebijakan Pangan Masa Presiden Megawati Soekarnoputri

Era Reformasi setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri tidak membawa perubahan yang signifikan bagi diversitas pangan pokok dalam kebijakan pangan nasional. Padahal, era ini identik dengan otonomi dan desentralisasi yang seharusnya mendukung kemandirian tiap daerah untuk mengedepankan produksi dan konsumsi pangan pokok yang beragam sesuai kearifan lokal dan keunggulan komparatif yang ada (Widodo 2001:2).

Hal ini terbukti dengan wacana pemerintah mencanangkan gerakan mandiri padi, kedelai, dan jagung (Gema Palagung) oleh Departemen Pertanian pada 1998. Padi, kedelai, dan jagung dinilai merupakan bentuk penyederhanaan (*simplifikasi*) diversitas pangan pokok secara seragam dan nasional. *Simplifikasi* demikian semakin diperparah dengan tetap

menjadikan beras sebagai pangan pokok teratas. Hal ini terlihat dari peningkatan impor beras akibat produksi beras secara nasional yang masih belum mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk yang masif.

Kebijakan pangan bias beras juga terjadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan membagikan beras miskin (*raskin*) pada 2003. Satu hal yang jelas dari fenomena ini adalah beras kembali menjadi alat politik sekaligus standar hidup yang seragam di seluruh Indonesia. Akibatnya serupa dengan era sebelumnya. Sejak saat itu, beras makin marak di daerah pedalaman, termasuk di Papua yang secara tradisional masyarakatnya bukan pemakan nasi (Arif 2021:195-196).

Sebelum menjadi presiden, Wakil Presiden Megawati mencanangkan Gerakan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2001. Gerakan ini adalah kelanjutan dari Kampanye Ketahanan Pangan Nasional pada 1 November 2000. Pada waktu itu, Wakil Presiden Megawati telah meminta Menteri Pertanian untuk membuat program pengembangan pertanian yang benar-benar sesuai dengan kondisi setempat, juga dengan memanfaatkan dan mengembangkan teknologi pertanian secara intensif. Menurut Suryana (2003:237-240), hal ini adalah wujud perhatian Wakil Presiden Megawati terhadap diversitas pangan pokok. Akan tetapi, proses dan kampanye ini pada akhirnya diakui belum berdampak signifikan.

Jika inisiatif dari pemerintah terbilang tidak maksimal, kalangan akademisi, yang bekerja sama dengan pihak swasta, turut bertindak. Mereka memunculkan inisiatif untuk mengencarkan usaha penganekaragaman pangan melalui sejumlah pertemuan dan diskusi yang menghasilkan sejumlah rekomendasi atau usulan risalah kebijakan (*policy brief*). Pada 2003, Simposium Penganekaragaman Pangan diselenggarakan. Satu tahun kemudian, simposium ini ditindaklanjuti dalam Seminar Pemantapan *Roadmap* Penganekaragaman Pangan selama hampir satu bulan, sejak 24 April hingga 15 Mei 2004 di sejumlah perguruan tinggi, yakni Institut Pertanian Bogor, Bogor (24 April 2004); Universitas Muhammadiyah Malang, Malang (26 April 2004); Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1 Mei 2004); Universitas Andalas, Padang (6 Mei 2004); Universitas Hasanuddin, Makassar (11 Mei 2004); dan Universitas Tanjungpura, Pontianak (15 Mei 2004).

Dalam seminar tersebut, sejumlah pakar mengemukakan pandangannya. Hariyadi et al. (2004:5-6) menyebut bahwa komunikasi berperan vital untuk mengedukasi masyarakat tentang upaya penganekaragaman pangan yang memadai. Dalam jangka pendek, iklan layanan masyarakat diperlukan sehingga media massa dan industri swasta berperan di dalamnya. Dalam jangka menengah, pemerintah daerah mempunyai peran yang besar. Dalam jangka panjang, perubahan pola pangan yang bersifat sistemik harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga dan sekolah. Secara jelas, “kampanye

4 sehat 5 sempurna yang selama ini menonjolkan beras sebagai sumber karbohidrat perlu direvisi,” ungkap mereka.

Lebih lanjut, upaya sistemik ini dapat mengadaptasi apa yang telah diprakarsai di sejumlah tempat. Salah satu model yang mereka ambil adalah kampanye “*Be Californian, Buy California Grown*” di Negara Bagian California, Amerika Serikat. Secara langsung, kampanye ini mendorong para produsen dan pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perhutanan untuk meningkatkan kualitas produk mereka yang pada akhirnya dapat mendorong roda perekonomian wilayah tersebut. Bagi konsumen, kampanye ini adalah cara untuk mengajak penduduknya bangga menjadi seorang California. Kembali lagi menegaskan apa yang disampaikan sebelumnya, ketika Indonesia tiba pada Era Reformasi, kampanye demikian dapat diterapkan dengan memanfaatkan momentum otonomi daerah sebagai agenda penganekaragaman pangan yang lebih efektif, holistik, realistis, juga spesifik (Hariyadi et al. 2004:22-23).

Di samping era otonomi dan desentralisasi, Era Reformasi identik dengan era globalisasi pada abad ke-21. Perkembangan teknologi yang pesat ini pun turut berpengaruh pada urusan pangan. Oleh sebab itu, Susanto (2004:69-87) menyebut bahwa paradigma baru yang holistik dan mengutamakan sisi ekologis sangat diperlukan. Tidak dapat disangkal bahwa era globalisasi menyebabkan banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, dilematik dalam hal pangan.

Saat pertanian berkelanjutan hendak dikembangkan dengan mengedepankan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal, produktivitas pertanian ditengarai tidak dapat mencukupi kebutuhan nasional. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan tersebut dapat terjadi jika mengorbankan sisi ekologis yang sudah terpuruk akibat Revolusi Hijau. Oleh sebab itu, jalan tengah yang dapat diambil adalah perpaduan teknologi modern dengan kearifan lokal. “Dengan kata lain, pengetahuan tradisional atau kearifan lokal merupakan sumber daya di masa datang,” tulisnya.

4. Diversitas Pangan Pokok dalam Kebijakan Pangan Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada masa awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia diterpa dengan bencana gizi buruk yang dialami ribuan anak mulai dari Sumatra hingga Papua. Salah satu penyebabnya adalah gempuran beras yang telah menggeser pengetahuan masyarakat setempat atas pangan lokal yang mampu bertahan di tengah krisis. Diakui oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, bahwa “kasus gizi buruk pada 2005 menunjukkan kegagalan kebijakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan akses terhadap pangan.” Bahkan, kondisi “memalukan” ini dikemas dalam satu pepatah, yaitu “ayam mati di lumbung padi” (Jhamtani 2008:18-36).

Jhamtani (2008:92-95) menjabarkan lebih lanjut akar permasalahan gizi buruk tersebut adalah sistem monokultur dan intensifikasi industri

yang melemahkan berbagai sistem pertanian lokal di Indonesia. “Dana untuk penelitian, dukungan politik, dan insentif ekonomi, terutama lebih diberikan kepada pemajuan sistem pertanian ala Revolusi Hijau atau usaha monokultur skala besar, seperti tambak udang dan perkebunan sawit,” ungkapnya. Monopoli pemerintah terlihat dengan upaya sistematis untuk mengganti varietas lokal yang tidak lain merupakan “tabungan atau warisan” pengetahuan tradisional tentang sistem produksi pangan lokal. Di samping itu, sistem penggunaan lahan dan pengairan lokal yang telah berkembang makin terancam dengan monopoli tersebut. Oleh sebab itu, sistem-sistem tradisional lokal yang memiliki daya tahan teruji oleh zaman seharusnya mendapat tempat yang lebih layak.

Pada akhirnya, Jhamtani (2008:130-142) menegaskan bahwa perubahan paradigma diperlukan untuk membangun sektor pertanian dan ketahanan pangan. *Pertama*, perubahan dari sistem industrialisasi monokultur menuju sistem lokal yang beragam. *Kedua*, perubahan dari sistem pertanian berbasis produksi menjadi pertanian berbasis petani dan sumber daya lokal. *Ketiga*, perubahan dari sistem pertanian berbasis kimia menuju pertanian yang ramah lingkungan. *Keempat*, perubahan dari sistem perencanaan serba terpusat menjadi perencanaan berbasis masyarakat lokal. *Kelima*, perubahan dari sistem pembangunan tidak terpadu menjadi sistem pembangunan terpadu.

Tidak sampai di situ, ia juga mengusulkan sejumlah hal untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan praktis.

Pertama, pemerintah perlu merumuskan berbagai peraturan, kerangka kelembagaan, dan insentif yang tepat. *Kedua*, kebijakan pertanian harus terpadu ke dalam program pembangunan pedesaan secara menyeluruh dan tidak boleh seragam untuk semua daerah. *Ketiga*, pemerintah dan komunitas ilmiah perlu menyadari bahwa petani adalah penemu dan ilmuwan terapan di tingkat lokal yang harus diakui dan dipertimbangkan dalam kebijakan riset, pengembangan pengetahuan, dan teknologi. *Keempat*, pemerintah berkewajiban mengatur dan mengendalikan kuota dan tarif impor bahan pangan untuk menunjukkan keberpihakan pada petani. Pada akhirnya, “para petani harus diperlakukan sebagai mitra kerja yang setara, bukan sekadar objek pelaksana.”

Dalam tataran kebijakan praktis, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai pada awalnya “jitu” merencanakan sektor pertanian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahun ke depan. Akan tetapi, sektor tersebut justru tidak mendapat prioritas teratas, melainkan prioritas kelima. Berbagai regulasi turunannya kemudian juga sudah menaruh keberpihakan kepada petani, tetapi implementasinya yang masih lemah. Dengan demikian, jalan konvensional, seperti impor pangan, kembali ditempuh di tengah arus liberalisasi perdagangan yang lebih ekonomis dan masif.

Lebih parahnya lagi, alih fungsi lahan pertanian terjadi secara besar-besaran akibat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang juga digagas

pada era ini. Muhammad Tassim Billah, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian, menyebut bahwa hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berbanding lurus dengan permintaan lahan untuk industri dan infrastruktur. Oleh sebab itu, gagasan untuk menambah jumlah lahan pertanian yang paling memungkinkan adalah mengalihfungsikan lahan hutan yang sama-sama kontroversial (Sari 2014).

5. Diversitas Pangan Pokok dalam Kebijakan Pangan Masa Presiden Joko Widodo

Visi pangan Presiden Joko Widodo setelah mulai menjabat pada 2014 dijabarkan dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Buku ini menerangkan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai “Lumbung Pangan Dunia 2045”. Sejumlah target dipasang di dalamnya, mulai dari swasembada beras, bawang merah, cabai, jagung, gula, kedelai, daging sapi, hingga bawang putih (Sulaiman et al. 2018:51-76).

Lebih lanjut, diversifikasi pangan merupakan salah satu jalan untuk mencapai kedaulatan pangan sesuai Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019. Akan tetapi, bidang pertanian yang menjadi prioritas dalam visi Nawacita tersebut dalam praktiknya masih menerapkan kebijakan pangan bias beras, yakni swasembada beras. Walhasil, hal ini pun tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya (Arif 2020:66).

Meskipun demikian, di tengah kebijakan pangan bias beras dalam skala nasional, sejumlah pemerintah daerah mulai mendukung kearifan lokal dalam hal pangan pokok. Di Papua, sagu sudah mulai mengalami industrialisasi sehingga pangsa pasar sagu tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga pasar internasional. Walau banyak tantangan terkait pendekatan kepada masyarakat adat harus dihadapi, industrialisasi yang tetap mengedepankan lingkungan dan penghormatan pada hak masyarakat adat menjadi salah satu alternatif untuk turut memajukan Papua (Arif 2019:157-175).

Hal senada juga terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada awalnya, pemerintah memandang rendah tanaman pangan lokal dan endemik di sana, yakni sorgum. Bahkan, upaya penggusuran lahan pertanian sorgum menjadi lazim pada waktu itu. Oleh sebab itu, para petani melancarkan perlawanan untuk membuka mata pemerintah daerah sehingga akhirnya mereka memberikan dukungan besar terhadap budidaya sorgum. Berbagai fenomena demikian menunjukkan bahwa alternatif pangan di masa depan sudah waktunya mendapat tempat yang layak dan kebijakan di daerah-daerah seharusnya mampu ditiru atau mengalami amplikasi secara nasional (Arif 2020:125-131).

Kajian terkini mengungkapkan bahwa strategi lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendukung diversitas pangan pokok di era perkembangan teknologi saat ini adalah sentralisasi (pemusatan) koleksi plasma nutfah yang menjadi kunci

pelestarian keberagaman sumber daya genetik di Indonesia (Ramadhan 2021:108-9). Hal ini merupakan kolaborasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta kearifan lokal sehingga varietas-varietas baru dapat diciptakan untuk mendukung pangan yang lebih berkualitas dalam jangka panjang (Zahroh 2021:125-126).

Ketika pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, Subrata (2021:131-142) menyatakan bahwa sistem pangan nasional, bahkan global, sangat bergantung pada pasokan yang besar dan kompleks. Oleh sebab itu, ketika terjadi gangguan logistik, fenomena kerawanan pangan makin marak. Ancaman krisis pangan ini sejatinya dapat ditanggulangi dengan menanggalkan ketergantungan pada mekanisme industrialisasi pangan kapitalis dan merekonstruksi sistem pasokan pangan lokal berbasis sosial-ekologi. Secara ringkas, pandemi merupakan momentum untuk kembali ke hakikat pertanian dan bukan justru mengulang kembali kesalahan yang sama dengan, misalnya, mencetak sawah-sawah baru atau lumbung pangan (*food estate*) yang jelas mengancam diversitas pangan pokok yang telah ada. “Sudah seharusnya kita mengembalikan sistem pangan lokal berbasis sosial-ekologi sebagai babak baru dalam mewujudkan ketahanan pangan bangsa pasca-pandemi Covid-19,” tulisnya.

Pada akhirnya, diversitas pangan pokok adalah “emas hijau” yang berpeluang menjadi alternatif solusi masalah pangan seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Secara istimewa, potensi ini hanya dapat ditemui pada masyarakat adat yang

tersebar luas di Indonesia. Oleh sebab itu, masyarakat adat merupakan benteng terakhir dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Mendukung diversitas pangan pokok sama dengan memberikan tempat yang layak dan pantas bagi masyarakat adat, juga masyarakat secara luas, untuk tidak hanya bertahan, tetapi berdaulat atas pangan (Arif 2021:269-281).

D. SIMPULAN

Diversitas pangan pokok adalah realitas hidup bangsa Indonesia. Sepanjang sejarahnya, terutama setelah Indonesia merdeka, diversitas pangan pokok telah menjadi bahan perdebatan dalam diskursus kebijakan pangan. Idealisme untuk mengangkat kearifan lokal secara nasional telah ditunjukkan oleh Presiden Soekarno dengan penerbitan buku *Mustika Rasa*. Akan tetapi,

Tabel Perbandingan Garis Besar Kebijakan Pangan Presiden Indonesia terkait Diversitas Pangan Pokok

No.	Nama Presiden	Periode	Garis Besar Kebijakan Pangan terkait Diversitas Pangan Pokok
1.	Sukarno	1945-1967	Presiden mengedepankan diversitas pangan pokok melalui pendirian Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan menginisiasi penyusunan buku <i>Mustika Rasa</i> yang memuat lebih dari 1.600 resep masakan Indonesia. Meski dalam pelaksanaan, kelangkaan beras masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia.
2.	Soeharto	1967-1998	Kebijakan bias beras karena terminologi “swasembada pangan” diterjemahkan sebagai “swasembada beras” melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Jenis pangan pokok dipersempit menjadi hanya beras. Prestasi “swasembada beras” pun menunjukkan puncak bias kebijakan tersebut.
3.	Megawati Soekarnoputri	2001-2004	Gerakan Ketahanan Pangan Nasional tidak berjalan maksimal. Pengkajian atas penganeekaragaman pangan juga tidak ditindaklanjuti secara matang. Terlebih, usaha memantapkan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan momentum otonomi daerah juga tidak terlaksana.
4.	Susilo Bambang Yudhoyono	2004-2014	Kebijakan liberalisasi perdagangan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) berdampak pada masifnya alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, komoditas pangan lokal juga kalah bersaing dengan produk asing.
5.	Joko Widodo	2014-sekarang	Visi Nawacita masih mengandung kebijakan swasembada beras, yang kemudian terwujud dalam kebijakan mencetak sawah baru dan lumbung pangan (beras). Meskipun demikian, secara sporadis dan lokal, kebijakan diversifikasi pangan pokok mulai terlihat di sejumlah daerah.

implementasi dari idealisme tersebut tidak berdampak signifikan.

Selanjutnya, para presiden setelah Soekarno belum menunjukkan perhatian yang besar atas diversitas pangan pokok. Presiden Soeharto yang berkuasa lebih dari tiga dekade justru mengedepankan politik beras yang mengulang kembali kesalahan pemerintahan kolonial. Monopoli pemerintah dalam produksi dan distribusi pangan pokok turut memengaruhi pola konsumsi pangan pokok masyarakat sehingga pangan pokok lokal menjadi pangan pokok kelas dua dan beras menjadi pangan pokok kelas satu di seluruh Indonesia. Meski pada waktu yang sama sejumlah pakar mengajukan perlunya diversifikasi pertanian, hal itu hanya sebatas kajian yang tak kunjung diimplementasikan.

Setelah Orde Baru runtuh dan Indonesia memasuki Era Reformasi, kebijakan pangan yang mengakomodasi diversitas pangan pokok juga tidak jauh berubah. Gerakan Ketahanan Pangan yang digagas oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tidak berjalan maksimal untuk mendukung hal tersebut. Padahal, pada saat yang bersamaan, sejumlah akademisi telah memberikan rekomendasi kebijakan untuk memanfaatkan momentum era globalisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah dalam upaya penganebaran pangan.

Hal demikian juga terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Krisis gizi buruk tidak disikapi secara matang dalam kerangka kebijakan pertanian. Bahkan, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pembangunan pertanian masih bertumpu pada beras.

Tidak jauh berbeda dengan itu, Presiden Joko Widodo melalui kebijakan lumbung pangannya juga dinilai mengancam diversitas pangan pokok yang selama ini telah berkembang di tengah masyarakat lokal. Bahkan, pandemi Covid-19 telah menjadi momentum untuk melihat kembali hakikat pertanian yang berakar pada keberagaman pangan pokok, bukan keseragaman sebagaimana kebijakan pangan bias beras yang lazim terjadi sekian lama.

Pada akhirnya, diversitas pangan pokok hanya dapat terakomodasi dalam kebijakan yang bersifat jangka pendek, berskala kecil/lokal/parsial, dan tidak adaptif dengan perubahan zaman. Beragam kebijakan yang ada cenderung mengulang kebijakan lama dan berkuat pada teori yang tidak dibarengi dengan praktik yang masif. Dengan demikian, hal ini masih belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah pada periode kontemporer. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat pun kembali didominasi oleh politik praktis yang tidak inklusif.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada panitia, peserta, panelis pada sesi pleno dan sesi panel, dan pemantik diskusi dalam International Conference on Indonesian Culture (ICONIC) 2021 sehingga penulis berkesempatan menyajikan makalah ini. Secara khusus, penulis berterima kasih kepada Dr. Agung Wicaksono (Departemen

Antropologi Universitas Gadjah Mada) dan Syarif Maulana (Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan) atas kritik dan saran yang berharga sebagai pembahas makalah penulis.

DAFTAR SUMBER

- Al-Rahab, Amiruddin. 2014. *Ekonomi Berdikari Sukarno*. Depok: Komunitas Bambu.
- Amang, Beddu dan M. Husein Sawit. 2001. *Kebijakan Beras dan Pangan Nasional: Pelajaran dari Orde Baru dan Orde Reformasi*. Bogor: IPB Press.
- Arif, Ahmad. 2019. *Sagu Papua untuk Dunia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Arif, Ahmad. 2020. *Sorgum: Benih Leluhur untuk Masa Depan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Arif, Ahmad. 2021. *Masyarakat Adat dan Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Arifin, Bustanil. 1994. *Pangan dalam Orde Baru*. Jakarta: KOPINFO.
- Atmosudiro, Sumijati. 2015. "Sejarah Pangan." Hlm. 3-21 dalam *Pertanian Terpadu untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*, disunting oleh B. H. Sunarminto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Boeke, J. H. 1942. *The Structure of the Netherlands Indian Economy*. New York: Institute of Pacific Relations.
- _____. 1946. *The Evolution of the Netherlands Indies Economy*. New York: Institute of Pacific Relations.
- Bunasor. 1990. "Diversifikasi dan Program Pembangunan Pertanian." Hlm. 122-43 dalam *Diversifikasi Pertanian dalam Proses Mempercepat Laju Pembangunan Nasional*, disunting oleh A. Suryana, A. Pakpahan, dan A. Djauhari. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Fahmid, Imam Mujahidin. 2004. *Gagalnya Politik Pangan di Bawah Rezim Orde Baru: Kajian Ekonomi Politik Pangan di Indonesia*. Jakarta: Sandi-Kota dan ISPEI.
- Gaol, H. L. dan Abdul Salam. 1990a. "Dampak Kebijaksanaan Deregulasi Terhadap Diversifikasi Pertanian." Hlm. 46-71 dalam *Diversifikasi Pertanian dalam Proses Mempercepat Laju Pembangunan Nasional*, disunting oleh A. Suryana, A. Pakpahan, dan A. Djauhari. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 1990b. "Pengaruh Diversifikasi Pertanian terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional." Hlm. 348-69 dalam *Diversifikasi Pertanian dalam Proses Mempercepat Laju Pembangunan Nasional*, disunting oleh A. Suryana, A. Pakpahan, dan A. Djauhari. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hariyadi, Purwiyatno, Bayu Krisnamurthi, Dahrul Syah, dan F. G. Winamo. 2004. "Roadmap Peng-

- anekaragaman Pangan.” Hlm.1-24 dalam *Penganekaragaman Pangan: Konsep, Realitas dan Aplikasi*, disunting oleh P. Hariyadi dan P. E. Giriwono. Bogor: Forum Kerja Penganekaragaman Pangan.
- Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*.
- Jhamtani, Hira. 2008. *Lumbung Pangan: Menata Ulang Kebijakan Pangan*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Mears, Leon A. dan Sidik Moeljono. 1990. “Kebijaksanaan Pangan.” Hlm. 29-78 dalam *Ekonomi Orde Baru*, disunting oleh A. Booth dan P. McCawley. Jakarta: LP3ES.
- Pakpahan, Agus dan Faisal Kasryno. 1990. “Diversifikasi Pertanian dalam Kaitan Intersektoral.” Hlm. 325-47 dalam *Diversifikasi Pertanian dalam Proses Mempercepat Laju Pembangunan Nasional*, disunting oleh A. Suryana, A. Pakpahan, dan A. Djauhari. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rahardjo, Iman Toto K. dan Herdianto, eds. 2001. *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*. Jakarta: Grasindo.
- Rahman, Fadly. 2016a. *Jejak Rasa Nusantara: Sejarah Makanan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2016b. *Rijsttafel: Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramadhan, Mushthafainal Akhyar. 2021. “Pelestarian Keragaman Sumber Genetika Tumbuhan untuk Kebutuhan Pangan dan Pertanian di Indonesia.” Hlm. 97-112 dalam *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 10 Pangan*, disunting oleh H. Prilliadi dan S. M. Dinayah. Jakarta: LIPI Press.
- Reid, Anthony. 2020a. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 1: Tanah di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- _____. 2020b. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rizal, J. J. 2020. “Mustika Rasa Sukarno: Makanan Kesukaan sampai Politik Pangan.” Hlm. xi-xxx dalam *Mustikarasa: Resep Makanan Indonesia Warisan Sukarno*. Depok: Komunitas Bambu.
- Sari, Elisa Valenta. 2014. “Warisan Masalah Pangan SBY untuk Jokowi.” *CNN Indonesia*. Diunduh 1 Februari, 2022 (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141020082500-99-6880/warisan-masalah-pangan-sby-untuk-jokowi>).
- Subrata, Bhaskara Anggarda Gathot. 2021. “Pandemi Covid-19: Kembalikan Sistem Pangan Lokal Berbasis Sosial-Ekologi Menuju

- Ketahanan Pangan Bangsa.” Hlm. 131-46 dalam *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 10 Pangan*, disunting oleh H. Prilliadi dan S. M. Dinayah. Jakarta: LIPI Press.
- Sulaiman, Andi Amran, Pantjar Simatupang, I Ketut Kariyasa, Kasdi Subagyo, Irsal Las, Erizal Jamal, Hermanto, Syahyuti, Sumaryanto, dan Suwandi. 2018. *Sukses Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045*. Jakarta: IAARD Press.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1990. “Aspek Sosial Ekonomi Diversifikasi Sektor Pertanian Pangan.” Hlm. 248-61 dalam *Diversifikasi Pertanian dalam Proses Mempercepat Laju Pembangunan Nasional*, disunting oleh A. Suryana, A. Pakpahan, dan A. Djauhari. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suryana, Achmad. 2003. *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sutanto, Rachman. 2004. “Tantangan Global Menghadapi Kerawanan Pangan dan Peranan Pengetahuan Tradisional dalam Pembangunan Pertanian.” Hlm. 69-89 dalam *Pangan, Kearifan Lokal dan Keaneka-ragaman Hayati: Pertaruhan Bangsa yang Terlupakan*, disunting oleh F. Wahono, A. B. Widyanta, dan T. O. Kusumajati. Yogyakarta: Cinde-laras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Wahono, Francis. 2004a. “Agenda Hidup Lestari: Berangkat dari Kemampuan Sendiri.” Hlm. 275-81 dalam *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati: Pertaruhan Bangsa yang Terlupakan*, disunting oleh F. Wahono, A. B. Widyanta, dan T. O. Kusumajati. Yogyakarta: Cindelarar Pustaka Rakyat Cerdas.
- Wahono, Francis. 2004b. “Depolitisasi Pangan: Sebuah Upaya Mengangkat Kearifan Lokal dan Mendayagunakan Keanekaragaman Hayati.” Hlm. 3-18 dalam *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati: Pertaruhan Bangsa yang Terlupakan*, disunting oleh F. Wahono, A. B. Widyanta, dan T. O. Kusumajati. Yogyakarta: Cindelarar Pustaka Rakyat Cerdas.
- Widodo, Sri. 2001. “Ketahanan Pangan pada Era Globalisasi dan Otonomisasi.” *Agro Ekonomi* 8(2):1-8.
- Zahroh, Zulfa Az. 2021. “Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Lokal dan Pengembangan Varietas Lokal sebagai Upaya Mendukung Peningkatan Kualitas Pangan.” Hlm. 113-30 dalam *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 10 Pangan*, disunting oleh H. Prilliadi dan S. M. Dinayah. Jakarta: LIPI Press.

